

PENDIDIKAN TEOLOGI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENDIDIKAN DEVELOPMENTALISME DI INDONESIA

Yudha Nata Saputra

ABSTRACT

Development in all fields requires a more educated society. Developmentalisme education policy answers the needs of development. How is the link between philosophy, educational theory and educational policy developmentalisme? How well developmentalisme educational practice that has been practiced in the educational environment in Indonesia? The study results showed that neopositivisme educational philosophy and theory of humanism education is the basis for education policy developmentalisme. In the practice of education, educational policy developmentalisme focused on efforts to explore the potential of students, technology-based approach to information and communication is an important tool in the practice of education. In the context of education policy developmentalisme, theological education in Indonesia comes with mission of theology.

Key phrases: education, education policy, educational phylosophy, Indonesian building, theological education, educational missiology.

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas salah satu dari sekian banyak jenis kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan *developmentalisme*, dengan terlebih dahulu melihat konteks filsafat pendidikan dan perkembangan teori belajar yang dilanjutkan dengan pembahasan pembangunan nasional di Indonesia sebelum kemudian dilanjutkan dengan melihat kebijakannya.

Pemahaman terhadap filsafat pendidikan dan teori belajar perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana keterkaitannya dengan kebijakan pendidikan. Sedangkan pembahasan kebijakan pembangunan nasional perlu di bahas sebagai fondasi bagi kebijakan pendidikan *developmentalisme* di Indonesia karena kebijakan pendidikan *developmentalisme* sendiri tidak terlepas dari kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan *developmentalisme* di Indonesia dilaksanakan

sekaligus melihat sejauhmana keterkaitannya dengan filsafat pendidikan dan perkembangan teori pendidikan.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, secara khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebijakan memegang peranan yang penting sebagai alat untuk mencapai tujuan. *United Nations* (1975) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.¹

Tanpa kebijakan jelas tidak akan ada suatu tindakan dan tanpa tindakan jelas manusia tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang diinginkannya. Kebijakan memegang peranan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, meskipun istilah kebijakan lebih sering didengar dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan namun kebijakan secara lebih luas menyentuh setiap aspek kehidupan manusia tidak terkecuali pendidikan.

Sebagai sebuah ilmu, kebijakan menjalin suatu garis bersama dengan filsafat, teori dan fakta, apapun bentuk hubungan antara mereka, entah selaras maupun menyimpang, masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.² Kebijakan yang diambil oleh seseorang atau kelompok mau tidak mau pasti akan senantiasa berhubungan dengan tujuan yang menjadi kerangka filosofis sebuah kebijakan.

Demikian juga halnya dengan pendidikan sebagai sebuah ilmu, pendidikan juga memiliki kebijakannya sendiri yang didasarkan kepada landasan filosofis, teori maupun fakta dalam pendidikan dan meskipun pendidikan sebagai sebuah ilmu baru namun kehadirannya saat ini telah menyita perhatian begitu banyak pihak akan pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan manusia.

¹ Manajemen pendidikan's Site : "Karakter Kebijakan Pendidikan Nasional", <http://ikmsatu.multiply.com/journal/item/2>. Diakses pada 12 Juni 2016.

² Bdk. Achmad Sanusi, Fakta, *Kebijakan, Ilmu, Filsafah Pendidikan* (Diktat: Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2010), 4-7.

Di era globalisasi seperti saat ini, di mana pembangunan berkembang pesat yang mengharuskan penguasaan kompetensi karena situasi persaingan yang nyaris tanpa batas telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu tumpuan keberhasilan pembangunan di suatu negara, tepat apa yang dikatakan bahwa “siapa yang menguasai ilmu pengetahuan maka dia akan berkuasa”. Kemajuan dalam bidang pendidikan di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah mampu menempatkan mereka sebagai negara-negara yang lebih maju dibandingkan kita.

Melihat situasi dan kondisi yang sedemikian itu maka pembangunan nasional di suatu negara mau tidak mau harus memasukkan pendidikan sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan. Tentu saja meskipun bisa jadi hal ini merupakan kebangkitan pendidikan namun sekaligus menjadikan beban pendidikan menjadi semakin besar, ketika pendidikan oleh sebagian pihak dianggap kurang berhasil maka pendidikan harus siap memberikan pertanggungjawaban.

Dengan demikian pendidikan untuk saat ini tidak lagi sekedar berbicara tentang moralitas, watak maupun pendidikan yang teroganisir dan bersifat masal tapi lebih luas lagi bagaimana menjadikan pendidikan sebagai salah satu agen pembangunan (*the agents of development*).³ Sebagai salah satu agen pembangunan maka pendidikan harus mampu memberikan kontribusi positif sekaligus sebagai katalis pembangunan, itulah yang menjadi fokus kebijakan pendidikan *developmentalism*.

FILSAFAT PENDIDIKAN

Empirisme

Empirisme percaya bahwa manusia dilahirkan sebagai tabula rasa, penginderaan dan refleksi adalah kunci untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan terbentuk melalui pengalaman, tindakan seseorang didasari oleh kebahagiaan/kesenangan tapi kebahagiaan itu tidak bertentangan dengan

³ Ibid., 32.

kebijakan, hukum-hukum moral tertentu ditetapkan oleh Tuhan, siapa yang mengikutinya akan masuk surga dan sebaliknya.

Tujuan pendidikan dalam empirisme adalah membentuk manusia yang berwatak atau berkebijakan⁴, manusia yang berwatak adalah manusia yang bertindak berdasarkan akal sehat. Untuk mencapai tujuannya itu maka isi pendidikan mencakup tiga hal yaitu pendidikan jasmani, pendidikan moral dan pendidikan intelektual yang dilakukan melalui pembiasaan, latihan sesuai minat anak yang melibatkan imbalan. Minat timbul dari persepsi individu terhadap realitas. Pusat pendidikan terletak pada pendidik (*teacher centered*).

Realisme

Filsafat realisme bisa merupakan materialisme, dualisme atau pluralisme. Materialisme memandang manusia berdasarkan apa yang bisa dikerjakannya. Menurut dualisme, manusia adalah jiwa merupakan organisme kompleks yang mampu berpikir sedangkan pluralisme, melihat manusia adalah makhluk yang mungkin memiliki kebebasan atau sebaliknya.⁵

Menurut materialisme kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak bergantung kepada pengetahuan/gagasan manusia dan kenyataan itu dapat diketahui oleh pikiran manusia. Dualisme berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari penginderaan. Sedangkan pluralisme mengatakan bahwa kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan mengujinya berdasarkan fakta.

Hakikat nilai (aksiologi) bagi realisme meliputi hukum-hukum alam dan kebiasaan/adat istiadat yang telah teruji. Kedua hal inilah yang mengendalikan perilaku manusia. Hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu menduduki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan kebiasaan/adat-istiadat.

⁴ Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 232.

⁵ Ibid. 227.

Tujuan pendidikan dalam realisme adalah menyesuaikan diri dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pengetahuan yang diajarkan adalah pendidikan umum (*the seven liberal arts*) yang mengembangkan kemampuan berpikir (*hard skills*) dan pendidikan praktis (*soft skills*) untuk bekerja seiring dengan makin bertambahnya kebutuhan dan kegiatan dalam masyarakat.

Tugas peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang berubah-ubah sedangkan peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan dan cara-cara mengajarkannya dengan bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan anak didik. Karena tekanannya adalah penguasaan maka realisme mengilhami lahirnya pendidikan berbasis kompetensi. Dalam kegiatan belajar maka disiplin moral dan mental menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan.

Neopositivisme

Neopositivisme menentang dualisme (ide dan kenyataan fisik), kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan yang diungkap ilmu-ilmu alam. Manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa (monistik), manusia adalah *homo sapiens* sehingga memiliki kemampuan berbahasa dan berpikir ilmiah. Pengetahuan didapat dari penginderaan, penginderaan hanya dapat menangkap hal-hal material. Tidak ada nilai absolut dan menolak nilai subjektif, yang diakui adalah nilai bio-psikologis ekonomik historis.

Tujuan pendidikan neopositivisme adalah pertama, membentuk masyarakat demokratis yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan dan gagasan. Kedua, membantu pertumbuhan intelektual dan moral (kepribadian). Ketiga, tujuan pertumbuhan intelektual adalah kematangan berpikir yang rasional. Keempat, perkembangan moral bertujuan mengembangkan sikap ilmiah dan humanis (penghargaan kepada sesama manusia).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan metode dan isi. Isi pendidikan mencakup pendidikan intelektual (ilmu alam, sosial, teknologi), pendidikan ilmiah (matematika dan bahasa) dan pendidikan moral (adil, jujur, netral, kesamaan derajat manusia). Adapun metode yang digunakan, pengajaran

ilmu yang pokok menggunakan eksperimen/latihan intelektual, untuk yang tidak pokok menggunakan ceramah sedangkan pendidikan moral diajarkan dengan pembiasaan.

Peserta didik mempunyai kemampuan terpendam yang berkembang melalui bantuan dan waktu, peserta didik aktif melakukan latihan dan peniruan. Untuk itu pendidikan bertugas melatih intelektual, vokasional, menyajikan informasi sistematis dan membimbing sedangkan dalam pendidikan moral, pendidik berperan sebagai pemberi imbalan.

PERKEMBANGAN TEORI PENDIDIKAN

Menurut Thordike keberhasilan belajar stimulus-respon (koneksi) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesiapan untuk bertindak (*law of readiness*), intensitas untuk mempraktikannya (*law of exercise*) dan akibat yang ditimbulkan (*law of effect*). Dengan demikian dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak maka keberhasilan dari tujuan pendidikan yang akan dicapai tergantung kepada faktor-faktor di atas.

Dengan bertambahnya bahan pelajaran yang diajarkan dan situasi yang menghadapkan individu kepada situasi yang semakin kompleks mengakibatkan perlunya perubahan dalam proses belajar. Tingkah laku seseorang tidak bisa lagi hanya dikontrol berdasarkan *stimulus-respon-reinforcement*, tingkah laku seseorang mulai ditentukan oleh kognisinya yaitu tindakan mengenal dan memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi.

Belajar mengenal dan memikirkan situasi inilah yang kemudian dikenal dengan psikologi *Gestalt*. Fokus dari psikologi *Gestalt* adalah keseluruhan, belajar adalah pengamatan /pemahaman (*insight*) mendadak terhadap hubungan bagian-bagian yang ada dalam situasi permasalahan (keseluruhan).

Ketika tujuan pembelajaran tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan maka penganut teori belajar behaviorisme menganggap kesalahan terjadi akibat stimulus yang tidak tepat sehingga pemecahannya adalah mengganti stimulus untuk menghasilkan respon yang diinginkan namun ada kalanya ketika stimulus berulang kali dicoba dan tidak kunjung menghasilkan respon yang diinginkan maka penganut *gestalt* menganggap bahwa proses

belajar tidak sesederhana S-R (*stimulus-respon*) tapi belajar itu tergantung kepada pemahaman individu terhadap situasi.

Penganut *Gestalt*, menganggap bahwa belajar itu adalah memahami bukan menghafalkan dan intensitas belajar seseorang akan lebih banyak ditentukan oleh tingkat kejelasan/keberartian dari apa yang dipelajarinya bukan oleh imbalan. Semakin berarti suatu pelajaran bagi seseorang maka semakin besar intensitas untuk belajarnya dan sebaliknya.

Perkembangan selanjutnya dari teori belajar *Gestalt* adalah teori belajar *Cognitive-Field*, yang dikembangkan oleh Kurt Lewin (1892-1947). Menurut Lewin belajar adalah hasil interaksi antara kekuatan-kekuatan dari dalam (tujuan, kebutuhan) maupun luar (tantangan, permasalahan), interaksi-interaksi tersebut menimbulkan perubahan dalam struktur kognitif.

Di samping Lewin berkembang juga teori belajar *Cognitive Developmental* dari Piaget. Belajar menurut Piaget adalah proses berpikir dari kongkret menuju abstrak. Perkembangan kognitif terjadi melalui proses akomodasi, proses akomodasi terjadi ketika siswa dihadapkan pada sesuatu yang belum diketahuinya dan berusaha untuk mencari tahu. Perkembangan mental menghasilkan kemampuan-kemampuan baru bagi individu (tahap-tahap perkembangan : sensori motoris – praoperasional – kongkret – formal)

Setelah Piaget kemudian muncullah *Discovery Learning* dari Jerome Bruner. Bruner berpendapat bahwa belajar harus disesuaikan dengan kemampuan anak dan belajar harus memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan makna bagi mereka sendiri. *The act of discovery* dari Bruner mengemukakan beberapa hal penting yaitu : 1) anak mengalami perkembangan potensi intelektual (kongkret-abstrak), 2) ganjaran intrinsik lebih berarti dari ekstrinsik, 3) anak belajar untuk menemukan, 4) anak lebih senang mengingat-ingat informasi (yang bermakna).

Ketika aliran pendidikan behavioristik yang menekankan kepada koneksi antara stimulus dengan respon atau aliran pendidikan kognitif yang menekankan kepada keseluruhan situasi sebagai dasar individu bertindak dirasakan tidak lagi cukup mengakomodasi kebebasan menyampaikan aspirasi dari individu, muncullah aliran pendidikan humanisme.

Humanisme dalam hal ini dirasakan lebih cocok dengan suasana kebijakan pendidikan *developmentalisme* yang memberikan kesempatan kepada individu menyalurkan aspirasinya. Jika sebelumnya tugas pendidikan adalah menjadikan manusia yang dianggap baik oleh lingkungan maka sekarang tugas pendidikan adalah menjadikan manusia mampu mengenal dirinya untuk selanjutnya manusia bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Psikologi humanistik muncul pada akhir tahun 1940, yang dikembangkan oleh para ahli psikologi, aliran ini berusaha untuk memahami perilaku manusia dari sudut si pelaku bukan dari sudut pengamat. Dalam dunia pendidikan sendiri, humanistik muncul pada tahun 1960 dan terus mengalami perkembangan sampai akhir abad ke-20.

Tokoh-tokoh aliran humanistik antara lain : Combs, Maslow dan Rogers. Combs menekankan kepada pentingnya memahami persepsi individu. Persepsi individu terhadap bahan yang diajarkan akan sangat mempengaruhi usahanya untuk belajar, belajar tidak tergantung kepada bagaimana bahan disampaikan tapi bergantung kepada bagaimana individu memberi arti kepada bahan tersebut.

Maslow, membangun teorinya berdasarkan asumsi bahwa dalam diri seseorang ada kekuatan untuk berkembang dan ada kekuatan yang menolak perkembangan itu sendiri, tapi justru kekuatan yang menolak perkembangan itulah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk maju, dorongan itulah yang membuat seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, terpenuhinya kebutuhan akan mendorong perhatian dan minat siswa begitu juga sebaliknya.

Sedangkan Rogers mengemukakan prinsip-prinsip belajar humanistik yaitu : kemampuan belajar bersifat alamiah, belajar bergantung kepada relevansi bahan bagi individu, belajar dipengaruhi persepsi individu, siswa harus belajar dengan melakukan/terlibat, inisiatif belajar akan berpengaruh terhadap hasil belajar, kepercayaan diri timbul dari kritik terhadap diri sendiri, dan belajar yang paling berguna adalah belajar mengenai proses belajar (*How to learn*).

Kebijakan Pendidikan Developmentalisme

Bertambahnya negara yang mendapatkan kemerdekaan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan aspirasi masyarakat dalam bidang politik dan ekonomi.⁶ Pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan mengalami perkembangan, timbulnya kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dunia, fokus kepada pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, munculnya kebebasan berusaha/berbisnis, bertambahnya keterampilan yang dibutuhkan, perlunya sumber daya manusia yang berkualitas, semuanya itu membutuhkan masyarakat yang semakin terdidik.

Seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat maka kebijakan pendidikan yang semula berfokus kepada penyesuaian diri dan tanggung jawab sosial menjadi fokus kepada upaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan pembangunan (*developmental*). Pendidikan menjadi agen pembangunan nasional yang mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, pendidikan yang lebih memberikan ruang gerak untuk manusia berekspresi, menyatakan aspirasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Akibatnya pendidikan pun menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, ada tujuan-tujuan baik yang bersifat jangka pendek-menengah-panjang yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tujuan pendidikan pun mengalami perkembangan menjadi rangkaian tujuan pendidikan nasional-institusional-kurikuler-instruksional.

Kebijakan Pendidikan Developmentalisme di Indonesia

Salah satu amanat UUD 1945 adalah mencerdaskan bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut maka UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

⁶ Bdk. Achmad Sanusi, *Fakta, Kebijakan, Ilmu, Filsafah Pendidikan* (Diktat: Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2010), 28.

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk mencapai hal tersebut maka sejalan dengan kebijakan pendidikan *developmentalisme* yang menuntut penguasaan IPTEK dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa maka pada pasal 31 ayat 5 UUD 1945 dikatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014 salah satunya adalah dengan penerapan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk e-pembelajaran dan e-administrasi.

Sejak tahun 2006 Depdiknas berkomitmen untuk menerapkan TIK dengan dioperasikannya Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas). Pada tahun 2010-2014 penyearuhan TIK didukung melalui kegiatan⁷ :

- a. Perluasan akses Jardiknas, TV Edukasi dan pengembangan konten pembelajaran berbasis TIK;
- b. Pengembangan sistem informasi manajemen untuk memudahkan tugas-tugas perencanaan, pelaporan, dan pengendalian berbagai macam kegiatan dan program;
- c. Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.
- d. Pengembangan pusat sumber belajar (*learning resources center*) berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah.
- e. Pengembangan sistem dan model pembelajaran berbasis TIK baik pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

⁷ *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014* (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 97.

Dalam rangka revitalisasi pendidikan inovatif, kreatif dan enterprenurial maka salah satu sarannya adalah dengan mewujudkan teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia yang diarahkan kepada pembentukan basis-basis teknologi pendukung industri kreatif, penguatan kapasitas penguasaan teknologi dan kemampuan pemanfaatan komputer di bidang ekonomi kreatif dengan meningkatkan mutu dan jumlah lembaga pendidikan di bidang tersebut dan penguatan iklim usaha kondusif bagi investasi teknologi pendukung ekonomi kreatif.

Berkaitan dengan nilai-nilai agama, pemerintah telah menjadikan pendidikan agama serta akhlak mulia sebagai salah satu pilar strategis pembangunan pendidikan nasional.⁸ Hal ini sejalan dengan UU Sisdiknas pasal 12 ayat 1 yang menetapkan pendidikan agama merupakan hak setiap peserta didik dan harus diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁹

Kemudian dalam rangka mengoptimalkan potensi peserta didik maka perlu dibangun suasana yang kondusif. Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Untuk mencapai hal itu maka salah satu strategi pemerintah pada tahun 2010-2014 adalah dengan mengadakan reformasi pembelajaran yang mendidik, dialogis dan menyenangkan.¹⁰

⁸ Ibid., 8.

⁹ Bdk. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 8.

¹⁰ *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 9.

Strategi di atas dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu : pertama, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, untuk mencapai hal ini maka digunakan teori belajar konstruktivisme dengan melakukan pendekatan belajar aktif. Kedua, pembelajaran kontekstual, merupakan proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Hakikat pembelajaran kontekstual ini menerapkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, refleksi dan penilaian otentik. Ketiga, pengembangan organisasi pembelajaran, yang berfokus kepada pengembangan kemampuan belajar (*learn to learn*).

Selanjutnya pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dalam rangka membentuk watak serta karakter bangsa yang bermartabat maka pemerintah baru-baru ini telah meluncurkan program pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah.

Dalam bidang kurikulum, kebijakan pendidikan juga dilakukan dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pasal 36 UU RI No. 20 Tahun 2003 ayat 2 “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Kemudian Pasal 36 UU RI No. 20 Tahun 2001 ayat 3 “Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan akhlak mulia;
3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

6. Tuntutan dunia kerja;
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. Agama;
9. Dinamika perkembangan global; dan
10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Kebijakan penerapan KTSP ini mengharuskan sekolah untuk menyusun sendiri model kurikulumnya dengan tetap berpatokan kepada standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan).¹¹ Dengan diberlakukannya KTSP maka menuntut partisipasi guru yang lebih besar dalam mengembangkan kurikulum, dengan berfokus kepada kebutuhan dan perkembangan peserta didik, perkembangan sosial-budaya masyarakat, kondisi dan kebutuhan faktor-faktor pendukung pelaksanaan. Guru dalam hal ini dituntut untuk selektif, kreatif dan adaptif karena pengembangan KTSP merupakan sebuah proses berkelanjutan, bukan hanya itu guru juga dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya.

Untuk meningkatkan kemampuan guru ini maka pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk guru minimum berijazah S1/D-4 dan untuk dosen minimum S2 atau S3. Tenaga kependidikan untuk kepala sekolah dan pengawas dibekali dengan pendidikan khusus dalam bidang manajemen pendidikan.¹² Selanjutnya untuk menjaga agar profesi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kuat dan bermartabat maka pemerintah juga berusaha meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan,

¹¹ Bdk. *Naskah Akademik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta : Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 8.

¹² *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 94-95.

hal ini sejalan dengan UU No. 14 tahun 2005 pasal 7 tentang prinsip profesionalitas guru dan dosen.¹³

Di samping beberapa kebijakan di atas, pemerintah juga memfokuskan pembangunan pendidikan kepada konsep pendidikan pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*) yang berpusat kepada peserta didik sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1.¹⁴ Pembelajaran sepanjang hayat difasilitasi pemerintah melalui ketiga jalur pendidikan, formal, informal dan nonformal sehingga setiap peserta didik dapat mengakses pendidikan setiap saat. Pendidikan yang berpusat kepada peserta didik dipahami sebagai usaha untuk memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subyek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

Kebijakan Pendidikan Developmentalisme dan Pendidikan Teologi di Indonesia

Di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 1 mengemukakan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik supaya memiliki kekuatan spiritual. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 30 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Dengan mencermati perundang-undangan di atas, bisa dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya mengurus hal-hal yang bersifat

¹³ UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7, ayat 1 poin f mengatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip salah satunya adalah memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.

¹⁴ Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

material, seperti ekonomi, politik, teknologi tapi juga memberikan porsi untuk aspek spiritual keagamaan yang diakui dalam perundangan-undangan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pendidikan teologi.

Kebijakan pendidikan *developmentalisme* yang menempatkan pendidikan sebagai katalisator pembangunan, di mana ujung tombak pembangunan adalah manusia yang bukan hanya menekankan aspek materi tapi juga spiritual perlu disadari betul oleh dunia pendidikan teologi. Lantas bagaimana perjalanan pendidikan teologi di Indonesia selama ini? Usaha untuk mengembangkan teologi secara kritis ini sudah dilakukan di Indonesia. Dalam konsultasi Teologi ke-1 tahun 1970, menghasilkan paradigma pendirian Teologi pergumulan rangkap. Dengan paradigma ini, ingin dikatakan bahwa gereja-gereja di Indonesia, termasuk didalamnya pendidikan teologi atau pengembangan ilmu teologi, memiliki pergumulan rangkap, yaitu bergumul dengan Firman Allah dan sekaligus bergumul dengan masyarakat Indonesia yang sedang memulai pembangunan nasional.¹⁵ Keinginan untuk berkontribusi terhadap situasi masyarakat sekitar tampaknya juga menjadi pusat perhatian pendidikan teologi di Indonesia meskipun tidak selalu mulus. Memasuki tahun 1980, prinsip teologi mengarah kepada ideologi negara.

Ungkapan seperti “partisipasi Gereja dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila” adalah contohnya. Tanpa disadari, teologi telah menjadi ideologi atau menjadi alat pembenaran kegiatan pembangunan yang dalam prosesnya telah pula melahirkan sikap-sikap negatif seperti korupsi dan ketidakadilan.¹⁶

Kecenderungan untuk menitikberatkan kepada konteks tanpa dibarengi sikap kritis membuat teologi justru bisa terjebak dalam situasi yang tidak baik. Dalam dasawarsa tahun 1990-an, masalah teologis yang paling dominan adalah masalah dampak pembangunan (karena itu perlu ada sikap kritis), masalah perempuan dan isu-isu sosial lain seperti HAM

¹⁵ BF Drewes dan Julianus Mojau. *Apa itu Teologi?: pengantar ke dalam ilmu teologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), 79.

¹⁶ Ibid. 80.

dan lingkungan hidup.¹⁷ Sementara itu pendidikan teologi memasuki abad ke-21 diperkirakan akan memuat agenda kemiskinan sebagai dampak ekonomi global/pasar bebas, demokratisasi (civil society), spiritualitas, ideologi, budaya lokal, kebangkitan agama-agama non-Kristen dan hubungan antara penganut-penganut agama yang plural, serta pengaruh dari teologi pentakostal dan evangelikal yang dominan.¹⁸ Dengan melihat kenyataan ini, bisa dikatakan bahwa pendidikan teologi yang berkembang di Indonesia bersifat dinamis, teologi pergumulan rangkap yang dipertahankan sampai saat ini telah berkembang begitu rupa meskipun sempat kehilangan sifat kritisnya di awal-awal kemunculannya.

Melihat secara singkat perjalanan pendidikan teologi di Indonesia, bisa dikatakan bahwa pendidikan teologi sendiri telah berupaya untuk berkontribusi dalam persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya termasuk dalam hal pembangunan. Dalam konteks bangsa Indonesia yang terus membangun, pendidikan teologi berusaha untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan. Namun kiprah pendidikan teologi di Indonesia sepertinya memiliki ruang lingkup yang terbatas hanya di kalangan gereja saja sehingga kontribusinya terhadap pembangunan masih sering dipertanyakan. Masyarakat selama ini lebih banyak hanya mengenal pendidikan teologi, hanya untuk menjadi pendeta saja akibatnya pendidikan teologi menempati posisi yang kurang menguntungkan.

Keterkaitan secara eksklusif antara teologi dan pendidikan imam ini nyaris menjadi semacam monopoli yang dewasa ini mungkin kurang menguntungkan, baik bagi perkembangan ilmu teologi maupun bagi pelayanan para imam sendiri. Di Eropa keadaan itu sudah lama berubah, karena para awam pun sudah banyak yang meminati teologi dan mengembangkan teologi secara kritis dengan prespektif yang lebih sosiologis daripada struktural dan hirarkis.¹⁹

Dalam kesempatan penulis bertemu dengan komisi X DPR tahun 2011 dalam rangka menunaikan tugas mata kuliah kebijakan pendidikan, disebutkan bahwa perguruan-perguruan tinggi keagamaan ini sepi

¹⁷ Ibid. 82.

¹⁸ Ibid. 83.

¹⁹ E. Martasudjita (Ed.). *Gereja yang Melayani dengan Rendah Hati bersama Mgr. Ignatius Suharyo* (Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 2009), 120.

peminatnya, karena itulah ada yang berubah bentuk menjadi universitas untuk menarik mahasiswa dengan membuka jurusan-jurusan umum. Inilah salah satu bentuk kerugian akibat adanya monopoli teologi dengan pendidikan iman, sifat eksklusif ini menghambat perkembangan pendidikan teologi yang pada akhirnya akan berujung kepada belum optimalnya kontribusi pendidikan teologi terhadap pembangunan. Padahal jika dilihat keinginan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ini sudah ada dalam perjalanan pendidikan teologi melalui teologi pergumulan rangkap, bukan tidak ada, hanya menjadi tidak optimal ketika sifat eksklusif dipertahankan oleh pendidikan teologi.

Bisa dikatakan bahwa kebijakan pendidikan *developmentalisme* sebenarnya tidak hanya muncul dalam konteks pendidikan umum (non teologi) saja tapi juga pendidikan teologi, jika pada awalnya pendidikan teologi hanya hadir untuk menjawab kebutuhan gereja tapi sampai saat ini pendidikan teologi juga perlu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat di luar gereja dengan berbagai pergumulannya melalui teologi pergumulan rangkap. Pembangunan manusia yang menjadi fokus kebijakan pendidikan *developmentalisme*, memiliki padanan dalam pendidikan teologi yang berporos kepada pembentukan manusia yang dilakukan melalui pembentukan kristiani, pembentukan Teologis dan pembentukan Pendeta.²⁰ Pembentukan kristiani mengembangkan pembentukan manusia yang berpusat kepada orang yang tertindas. Pembentukan Teologis, pembentukan manusia yang bukan hanya berpengetahuan tapi juga bernalar. Pembentukan pendeta, hanyalah salah satu tujuan dari pendidikan teologi, bukan satu-satunya tujuan.

Berdasarkan tiga pilar pendidikan teologi tadi maka pendidikan teologi tidak dipahami secara sempit sebagai pendidikan untuk jabatan pendeta tapi pembentukan umat Allah yang berkontribusi kepada dunia. Pilar-pilar pendidikan teologi memiliki kesepadanan dengan UU Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 30 ayat (2), "Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan

²⁰ Douglas J. Elwood. *Teologi Kristen Asia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 12-13.

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.” Memahami nilai-nilai ajaran agama diakomodasi dalam pilar pembentukan teologis, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama ada dalam pilar pembentukan kristiani dan pembentukan teologis dan menjadi ahli agama, ada dalam pilar pembentukan Pendeta. Terdapat spektrum yang lebih luas dari pendidikan teologi daripada sekedar menghasilkan calon-calon pendeta di gereja, inilah yang tampaknya perlu disadari betul oleh pendidikan teologi. Kurang diminatinya pendidikan keagamaan karena masyarakat berpikir hendak menjadi ahli ilmu agama sementara banyak masyarakat yang bukan pendeta tapi justru tertarik mempelajari teologi.

Tentunya kiprah pendidikan teologi dalam pembangunan nasional akan optimal jika banyak orang yang mengenyam pendidikan teologi tanpa harus terbatas untuk menempati posisi jabatan pendeta saja. Dalam lingkup mikro pendidikan teologi di Indonesia mengambil fokus kepada pembentukan pendeta, kemudian meluas kepada pembangunan jemaat sementara dalam lingkup makro pendidikan teologi di Indonesia mengambil fokus kepada pembangunan bangsa. Pembentukan pendeta dan pembangunan jemaat sudah sering diperhatikan oleh gereja sebagai salah satu stakeholder daripada pendidikan teologi disamping pemerintah yang muncul dengan kehadiran STAKN (Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri). Tapi fokus kepada pembangunan bangsa masih belum terlihat jelas meskipun munculnya teologi rangkap menjadi sinyal untuk ke arah sana. Sampai dengan saat ini fokus pendidikan teologi lebih banyak ke dalam daripada keluar, padahal peluang untuk ke arah itu terbuka lebar mengingat dampak pembangunan yang tidak selalu baik. Menghadirkan sumbangan khas pendidikan teologi yang mampu diterima umum, itulah yang masih jarang. Padahal celah itu bisa dimanfaatkan melalui serangkaian aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini masih belum banyak disadari. Aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus kepada masalah-masalah dan persoalan yang terkait eksistensi pembangunan bisa menjadi peluang untuk pendidikan teologi. Di samping itu kebijakan Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Kristen untuk membuat Pendidikan Teologi sejajar dengan pendidikan umum melalui akreditasi bisa dilihat sebagai peluang untuk pendidikan teologi memberikan andil yang lebih besar bagi pembangunan.

Misi Pendidikan Tinggi Teologi

Dalam konteks kebijakan pendidikan *developmentalisme* di Indonesia, kebijakan mutu pendidikan menjadi acuannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini, mutu sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih rendah. Laporan *Human Development Index* (HDI) tahun 2013, menempatkan Indonesia di urutan ke-108, sementara Malaysia berada di urutan ke-62 dan Thailand urutan ke-89. Indonesia hanya unggul dari Filipina di urutan ke-117 dan Vietnam urutan ke-121.²¹ Rendahnya mutu SDM ini berhubungan erat dengan daya saing bangsa, *The Global Competitiveness Report* 2010-2011 menempatkan Indonesia pada urutan ke-44 dari 139 negara di dunia dengan GCI (*Global Competitiveness Index*) sebesar 4.43, masih berada di bawah Thailand yang berada di urutan ke-33 (4.51) dan Malaysia yang menempati urutan ke-26 (4.88). Menghadapi situasi demikian, kebijakan pendidikan *developmentalisme* merasa perlu untuk mengupayakan lahirnya masyarakat yang lebih terdidik. Akibatnya perhatian terhadap mutu pendidikan menjadi penting.

Masyarakat yang terdidik adalah SDM yang bermutu yang akan dihasilkan melalui pendidikan yang bermutu pula. Supaya di Indonesia pendidikan bisa bermutu maka perlu dilakukan melalui kebijakan mutu. Kebijakan mutu pendidikan dilakukan melalui proses standarisasi mutu. Oleh karena itu pemerintah melalui Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 mengeluarkan peraturan terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat. Standar-standar tersebut merupakan standar mutu minimal yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia, maka perlu dilakukan penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini bertujuan untuk menilai bahwa benar semua kegiatan pendidikan yang dilaksanakan memang sudah sesuai dengan standar mutu minimal yang dituntut. Kegiatan penjaminan mutu ini, dilakukan melalui kegiatan akreditasi.

²¹ Human Development Report. <http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components>. Diunduh 29 September 2015.

Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa tujuan akreditasi adalah menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi dan menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi, agar masyarakat tidak dirugikan.

Lantas sudah sejauh mana partisipasi Pendidikan Tinggi Teologi (PTT) di Indonesia terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan yang menjadi esensi dalam kebijakan pendidikan *developmentalisme*? Website BAN-PT Ristek Dikti menunjukkan untuk program studi teologi S-1 ada 218, S-2 ada 52 dan S-3 ada 8, totalnya ada 278 program studi. Tapi hanya 9 program studi saja yang memiliki predikat unggul (akreditasi A) atau baru 3,2% saja dari 278 program studi teologi yang sudah diakreditasi. Sembilan program studi tersebut terdiri dari S-1, 6 dari 218 program studi (2,75%), S-2 dua dari 52 program studi (3,85%) dan S-3 satu dari 9 program studi (12,5%). Berdasarkan data di atas bisa dikatakan bahwa masih sedikit sekali pendidikan teologi yang memiliki mutu pendidikan yang unggul. Dengan kondisi ini, tentu sumbangan Pendidikan Tinggi Teologi bagi upaya mencetak SDM manusia yang unggul masih sangat terbatas, karena mutu pendidikan akan terkait dengan mutu lulusannya. Meski demikian masih adanya PTT yang memperoleh akreditasi unggul bisa menjadi cermin untuk PTT yang lain untuk segera memacu dirinya.

Tabel 1.1

Peringkat akreditasi “A” untuk Program Studi Teologi

No.	Nama PT	Jenjang		
		S1	S2	S3
1.	Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya	A		
2.	Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta	A	A	A
3.	STKIP Santu Paulus	A		
4.	Universitas Kristen Duta Wacana	A	A	
5.	Universitas Kristen Satya Wacana	A		
6.	Universitas Sanata Dharma	A		

Sumber : BAN-PT Ristek Dikti, Maret 2017

Misi yang tepat dan dijalankan dengan benar akan membawa organisasi kepada tujuannya, sebaliknya misi yang sembarangan dan serampangan akan menyesatkan organisasi. Bagaimana PTT yang meraih predikat unggul menjalankan roda organisasinya? Nilai A saja rasanya tidak cukup untuk mendeskripsikan mutu PTT yang bersangkutan. Misi masing-masing PTT menjadi penting untuk bisa melihat keberhasilan mereka. Di bawah ini dicantumkan misi beberapa program studi teologi yang terakreditasi unggul.

Tabel 1.2

Misi Program Studi Teologi

No.	Perguruan Tinggi	Misi
1.	Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya	1. Mengembangkan ilmu filsafat dan teologi; 2. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang unggul di bidang filsafat dan teologi dalam dialog dengan ilmu-ilmu lain yang terkait; 3. Menjadi pusat pengembangan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan, berorientasi pada nilai kemanusiaan universal, cita-cita bangsa Indonesia serta dialog man, dan keyakinan yang terbuka; 4. Melibatkan diri dalam kehidupan intelektual, kultural dan spiritual bangsa.
2.	Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta	Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berkualitas dan relevan dengan situasi dan kebutuhan gereja dan masyarakat di Indonesia.
3.	Prodi Teologi STKIP Santu Paulus	1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka menghasilkan tenaga pendidik PAK, pembina iman Katolik, perancang dan pelaksana pastoral yang kompeten. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu yang dapat dimanfaatkan untuk

- mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang berkualitas serta untuk mengembangkan kemajuan pendidikan dan jemaat beriman.
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan kontekstual pendidikan dan reksa pastoral.
4. Prodi Teologi
Universitas Kristen
Duta Wacana
1. Menyelenggarakan pendidikan teologi dengan cara membekali para peserta didik dengan penguasaan pengetahuan tentang Kitab Suci secara memadai
 2. Menyelenggarakan pendidikan teologi dengan cara membekali para peserta didik dengan penguasaan pengetahuan tentang konteks kehidupan bermasyarakat sebagai arena berolah teologi secara kontekstual
 3. Menyelenggarakan pendidikan teologi dengan cara membekali para peserta didik kemampuan untuk menginteraksikan secara kritis inovatif antara teks-teks kitab suci dengan konteks kehidupan konkrit dalam rangka melahirkan teologi-teologi yang fungsional
 4. Menyelenggarakan pendidikan teologi dengan tetap mengedepankan pentingnya penelitian sebagai sumber utama pengembangan ilmu teologi
 5. Menyelenggarakan pendidikan teologi dengan senantiasa melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan masyarakat menuju sejahtera
 6. Menyelenggarakan pendidikan teologi dengan cara membekali siswa didik dengan ketrampilan-ketrampilan melakukan layanan sosial sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada.
5. Prodi Teologi
1. Menyelenggarakan pendidikan filsafat dan

- | | |
|------------------------------|--|
| Universitas Sanata
Dharma | <p>teologi yang holistik dan dialogis melalui pendekatan yang menjunjung tinggi martabat manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memajukan penelitian filsafat dan teologi yang kontekstual dengan berorientasi pada nilai-nilai universal, kebangsaan, dan dialog kemanusiaan 3. Mengambil bagian dalam pengembangan masyarakat (lokal dan dunia) yang terbuka, majemuk, demokratis, dan cinta lingkungan (ekologis). |
|------------------------------|--|

Sumber : Website Perguruan Tinggi Masing-masing, Maret 2017

Tentu saja, semua perguruan tinggi termasuk PTT memiliki misi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat). Pertanyaannya adalah pendidikan yang seperti apa? penelitian seperti apa? dan pengabdian kepada masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan oleh PTT dalam konteks kebijakan pendidikan *developmentalisme* saat ini?

Dalam penyelenggaraan pendidikan di PTT, tiga dari lima PTT (60%) memiliki fokus terhadap keinginan untuk menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan bermutu. Dua dari lima PTT (40%) fokus kepada usaha untuk menghasilkan teologi yang mampu diterapkan di masyarakat. Dua dari lima PTT (40%) membekali lulusannya dengan kompetensi/keterampilan. Dua dari lima PTT (40%) menerapkan pendidikan yang bersifat dialogis (40%). Sementara aspek-aspek lainnya dalam pendidikan terkait dengan kekhasan dari prodi di PTT masing-masing seperti pendekatan multidisipliner, lapangan kerja lulusan, pengetahuan Kitab Suci, dan humanis.

Pendidikan dalam konteks kebijakan *developmentalisme* adalah pendidikan yang fokus kepada pengembangan potensi siswa, akibatnya pendidikan tidak lagi dipahami sebagai upaya memasukkan pengetahuan kepada siswa. Model-model pendidikan yang bersifat dialogis menjadi penting untuk diterapkan karena memungkinkan untuk siswa mengembangkan potensinya. Dalam rangka untuk daya saing lulusan PTT maka pembekalan terhadap kompetensi yang dibutuhkan menjadi penting.

Misi pendidikan PTT bisa dikatakan sebagian sudah memiliki daya dukung terhadap kebijakan pendidikan *developmentalisme*. Tapi sesuai dengan tujuan dari pendidikan keagamaan di Indonesia yang memiliki tujuan untuk menghasilkan ahli ilmu agama atau orang-orang yang mengamalkan ajaran agamanya, sepertinya belum mendapatkan tempat dalam misi PTT, akibatnya kemampuan spiritual yang seharusnya menjadi kekhasan dari lulusan PTT masih diabaikan, padahal pembangunan di Indonesia tidak saja dimaknai sebagai pembangunan fisik tapi juga pembangunan spiritual, dalam hal inilah PTT bisa memberikan kontribusi yang signifikan.

Untuk bidang penelitian di PTT, dua dari lima PTT (40%) memiliki keinginan untuk fokus kepada penelitian yang bersifat pengembangan yang berorientasi universal kebangsaan. Ada juga PTT yang berfokus kepada penelitian yang bersifat *applied research* agar bisa dimanfaatkan masyarakat dengan mengedepankan mutu. Ada juga PTT yang fokus kepada pengembangan ilmu teologi dalam penelitiannya. Bisa dirangkumkan, terdapat tiga model penelitian yang dilakukan PTT, yang bersifat pengembangan (*research & development*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian murni (*pure research*). Dalam konteks kebijakan pendidikan *developmentalisme*, perlunya untuk meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dalam rangka mendukung pembangunan.

Jumlah publikasi ilmiah terindeks Scopus pada 2016, Malaysia memiliki jumlah terbanyak di Asia Tenggara, yakni 24.168 publikasi, disusul Singapura (18.125 publikasi), Thailand (12.611 publikasi), Indonesia, dan Filipina (2.288 publikasi).²² Melihat data di atas, maka perlu untuk terus meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah, pemerintah sendiri menerapkan kewajiban bagi profesor untuk terus berkarya, selain melalui pendanaan tentunya PTT, jika selama ini fokus kepada pendidikan maka dalam konteks kebijakan pendidikan *developmentalisme* perlu memberikan perhatian terhadap aspek penelitian dengan cara mendorong dosen dan mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan penelitian. Dalam kerangka kebijakan pendidikan *developmentalisme* terdapat tiga tingkatan perguruan tinggi (*university*), *teaching university*, *research university* dan *entrepreneurship university*, jika selama ini PTT nyaman dengan kondisinya

²² Yun/Jog, *Jumlah Publikasi Ilmiah Ditargetkan Lewati Malaysia*

<http://www.kopertis12.or.id/2016/12/29/jumlah-publikasi-ilmiah-ditargetkan-lewati-malaysia.html> diakses 23 Maret 2017.

sebagai *teaching university* maka PTT perlu segera meninggalkan kenyamanannya dengan beralih menjadi PTT yang berbasis riset “*research university*”. Terdapat korelasi antara jumlah penelitian dengan kemajuan suatu bangsa. Dengan demikian dalam konteks kebijakan pendidikan *developmentalisme* perlu perhatian terhadap upaya meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitian perguruan tinggi termasuk PTT.

Produktivitas Pelbagai Bangsa dibandingkan dengan Jumlah Publikasi dan Sitasi 1997–2001²³

Negara	Jumlah Publikasi	Jumlah Sitasi	GDP per kapita
India	77.201	188.481	487
Cina	115.339	341.519	989
Jerman	318.286	2.199.617	24.051
Jepang	336.858	1.852.271	31.407
USA	1.265.808	10.850.549	36.006

Sementara dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, tiga dari lima PTT (60%) mempersepsikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk keterlibatan diri dalam masyarakat luas, tidak terbatas pada komunitas tertentu (seperti gereja). Ada juga PTT yang fokus kepada kegiatan pengabdian masyarakat yang menjawab kebutuhan dan tantangan di masyarakat. Bisa dikatakan secara umum harapan untuk membuat masyarakat lebih baik menjadi kunci dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PTT saat ini. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1 mencantumkan bahwa pengabdian kepada masyarakat difokuskan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa melalui proses menanamkan, menerapkan dan membudayakan IPTEK. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya perlu mendapatkan tempat dalam misi PTT melalui penajaman misi, bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak dimaknai sebagai bentuk kepedulian/keterlibatan PTT saja tapi dalam rangka memajukan

²³ Wasmen Manalu, *Materi Presentasi Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional* www.atmajaya.ac.id diakses Maret 2017.

masyarakat dan mencerdaskan bangsa melalui bentuk-bentuk kegiatan yang terkait dengan penanaman, penerapan dan pembudayaan ilmu teologi sebagai *core PTT*.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan *developmentalisme* di Indonesia dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan tujuan pendidikan *developmentalisme* yang memberikan kesempatan kepada individu untuk menyalurkan aspirasinya, hal itu dilakukan melalui proses mengenal diri untuk selanjutnya manusia bisa mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya maka teori belajar humanisme menjadi landasan bagi kebijakan pendidikan *developmentalisme*.

Teori belajar humanisme sendiri dibangun di atas kerangka filsafat neopositivisme hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan neopositivisme yaitu : pertama, membentuk masyarakat demokratis yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan dan gagasan. Kedua, membantu pertumbuhan intelektual dan moral (kepribadian). Ketiga, tujuan pertumbuhan intelektual adalah kematangan berpikir yang rasional. Keempat, perkembangan moral bertujuan mengembangkan sikap ilmiah dan humanis (penghargaan kepada sesama manusia).

Dalam konteks kebijakan pendidikan *developmentalisme*, pendidikan teologi di Indonesia hadir dengan teologi pergumulan rangkap. Sementara dalam misi pendidikan tinggi teologi di Indonesia, dipusatkan dalam tridharma perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan sudah terdapat kesadaran akan perlunya pendidikan yang mengembangkan potensi mahasiswa namun kekhasan pendidikan teologi sebagai pendidikan keagamaan belum terlihat. Dalam bidang penelitian, terdapat beberapa model penelitian yang dikembangkan, namun perhatian terhadap jumlah dan mutu penelitian masih perlu diperhatikan. Dalam bidang pengabdian masyarakat, PTT memahaminya sebagai bentuk keterlibatan dalam masyarakat, namun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih perlu perhatian.

YUDHA NATA SAPUTRA, Dosen Pendidikan Agama Kristen dan Metode Penelitian di STT Cipanas. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Magister Atrium (M.A.) di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, dan Magister Teologi (M.Th.) di STT Kharisma, Bandung, serta S3 Ilmu Pendidikan/Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara, Bandung.